Politisasi Agama pada Kampanye Pemenangan Eramas dalam Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018

Politicize Religion on Eramas Winning Campaign in the North Sumatra Governor Election in 2018

Miftahul Husna Siregar, Muhammad Arif Nasution & Warjio*

Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 06 Januari 2021; Direview: 06 Januari 2021; Disetujui: 25 November 2021

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses politisasi agama yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon Eramas dalam kampanye Pilkada Sumatera Utara tahun 2018 silam. Masalah dalam penelitian ini difokuskan pada Tujuan penelitian ini adalah guna untuk melihat proses politisasi agama dan pola-pola apa saja yang terkandung di dalam politisasi agama semasa kampanye Pilkada Sumatera Utara tahun 2018 silam. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif dan berjenis kualitatif, yang memfokuskan masalahnya pada fenomena yang aktual dan terpercaya pada masa dilakukannya penelitian. Temuan penelitian ini adalah, proses politisasi agama yang dilakukan oleh tim pemenangan Eramas dengan melakukan pendekatan ke berbagai pemuka agama islam, melakukan kegiatan besar seperti zikir akbar di lapangan Benteng Medan dengan mengundang ulama-ulama tersohor, menjalankan program mobil-mobil keliling membersihkan masjid, hingga politisasi agama dalam Kampanye Eramas yang terbukti dengan penggunaan isu "tidak memilih pemimpin kafir" dan melakukan gerakan subuh berjamaah di masjid yang di mana hal ini berkaitan dengan umat islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses politisasi agama yang dilakukan oleh tim pemenangan pasangan calon Eramas dalam kampanye Pilkada Sumatera Utara tahun 2018, baik dalam bentuk politisasi agamanya maupun tanggapan pihak-pihak terkait dalam menanggapi politisasi agama tersebut.

Kata Kunci: Politisasi Agama; Politik Identitas; dan Pilkada.

Abstract

This paper aims to find out the process of politicizing religion carried out by the winning team for the Eramas candidate pair in the 2018 North Sumatra election campaign. The problem in this study aims at the purpose of this research is to see the process of politicizing religion and what patterns are contained in the politicization of religion during the 2018 North Sumatra election campaign. This research uses descriptive and qualitative methods, which focus on focusing on actual and reliable phenomena during the research period. The findings of this study are, the process of politicizing religion carried out by the Eramas winning team by approaching various Islamic religious leaders, carrying out major activities such as remembrance akbar in the Benteng Medan field by inviting famous clerics, running a mobile car program to clean mosques, to politicizing religion. in the Eramas Campaign which was proven by the use of the issue of "not electing infidel leaders" and carrying out the morning congregational movement in the mosque related to Muslims. This study aims to analyze the process of politicizing religion carried out by the winning team for the Eramas pair in the 2018 North Sumatra election campaign, both in the form of politicizing their religion and the responses of related parties in responding to the politicization of religious candidates.

Keywords: Politicization of Religion; Identity Politics; and Election.

How to Cite: Siregar, M.H. Nasution, M.A. & Warjio (2021). Politisasi Agama dalam Kampanye Pemenangan Eramas pada Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018, PERSPEKTIF, 11 (1) (2022): 1-7

*Corresponding author:

E-mail: warjio@usu.ac.id

ISSN 2085-0328 (Print)

ISSN 2541-5913 (online)

PENDAHULUAN

Tahun 2018 merupakan tahun politik bagi Provinsi Sumatera Utara, karena pada tanggal 27 Juni 2018 merupakan hari pemilihan kepala daerah yang juga serentak dilakukan di beberapa daerah di tanah air. Pada Pilkada Sumatera Utara kali ini, memiliki dua pasangan calon yang di antaranya adalah Pasangan Calon nomor urut 01 yaitu, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) dengan Pasangan Calon nomor urut 02 yaitu, Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus (Djoss). Yang menarik dari Pilkada Sumatera Utara tahun 2018 ini adalah kekhawatiran dari berbagai pihak, hal ini dikarenakan salah satu Calon Kandidat merupakan mantan Calon Kepala Daerah pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Dan kekhawatiran dalam pilkada ini berpotensi menimbulkan perpecahan antara kelompok sosial masyarakat secara horizontal yang menyebabkan kepada timbulnya sebuah konflik, ketegangan dan bisa berujung pada sebuah kekerasan (Wikanda, 2018; Nainggolan, 2021).

Kekhawatiran ini juga ditimbulkan akibat adanya isu politik identitas yang digunakan dalam kampanye, yang dalam penelitian ini isu politik identitas yang difokuskan adalah politisasi agama. Pada Pilkada Sumatera Utara tahun 2018 silam, juga menjadi momen di mana agama dan politik menjadi sarana utama dalam hal pemasaran politik yang dilakukan oleh kedua kandidat, khususnya pasangan calon Eramas di masa itu. Hal ini dikarenakan diangkatnya isu agama oleh tim pemenang pasangan calon Eramas, di mana hal ini ditimbulkan karena pasangan lawan bukan beragama muslim. Dan ini diketahui menjadi pemicu munculnya isu politisasi agama dalam kampanye di pilkada Sumatera Utara tahun 2018 lalu. Dimana dengan adanya isu ini kemungkinan yang terjadi dalam masyarakat adalah dalam hal pengaruh dan mampu mengambil simpati masyarakat (khususnya muslim) dengan mengangkat isu politisasi agama (Afdhol, 2021; Manalu dkk, 2020).

Apalagi hal ini juga berkaitan dengan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 lalu, dimana politisasi agama sangat mempengaruhi hasil dari Pilkada tersebut. Dan karena adanya kasus yang terkait penistaan agama dari salah satu Calon Gubernur di DKI Jakarta hal ini menjadi pendongkrak utama kemenangan salah satu calon yang menjual isu politik identitas dalam hal ini adalah politisasi agama. Dan di mana juga dalam pilkada Sumatera Utara tahun 2018 ini salah satu pasangan calonnya merupakan mantan Calon kandidat pada Pilkada DKI Jakarta lalu yang juga menggalang isu politisasi agama didalamnya. Sehingga dengan kata lain Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu menjadi salah satu tolak ukur bagi Pilkada Sumatera Utara dalam melakukan pemasaran politik.

Dalam Pilkada, lazim halnya menjadi arena dan sarana antar kelompok sosial-politik yang tidak jarang menimbulkan perpecahan karena sudah didasari dengan sentimen kesukuan maupun sentimen antar agama (Anhaf, 2015). Berbagai simbol dan lambang keagamaan sering kali menjadi acuan untuk mendapatkan kekuasaan yang menyebabkan munculnya tokoh-tokoh yang secara eksklusif muncul sehingga isu-isu tadi dapat dikembangkan dan menyebar secara luas. Serta penggalangan isu (khususnya isu politisasi agama) ini digencarkan demi mencuri perhatian dari kelompok penguasa atau kelompok mayoritas penduduk dengan menggunakan identitas (agama) tadi. Secara umum, konsep identitas di sini dapat dikatakan sebagai citra yang dapat membedakan individu/kelompok dengan individu/kelompok lainnya yang dibangun sedemikian hingga agar dapat dimodifikasi secara terus menerus melalui interaksi dengan pihak-pihak lain (Keitzentein, 1996).

Pada dinamika politik di ranag lokal, khususnya pada pilkada, hal ini menjadi momen yang membuat terjadinya peningkatan konflik sosial dan konflik keagamaan yang tengah berlangsung di suatu daerah. Ini dikarenakan pada momen Pilkada ini terjadi pertemuan antara berbagai penguasa yang memiliki kepentingan, baik itu politik hingga kepentingan dalam hal perebutan kekuasaan yang terfokus pada isu yang tengah terjadi yang berkaitan dengan Pilkada dan mampu menimbulkan minat bagi pemilih dalam hal ini. Kepentingan-kepentingan tersebut bisa merupakan isu-isu yang sensitif atau suatu kelemahan dari pasangan lawan yang berguna untuk meraih simpati pemilih dan mampu meraup suara yang lebih banyak. Akibat yang ditimbulkan dari penggalangan isu yang berkaitan dengan identitas (agama) ini harusnya bisa bersifat lebih politis, namun menjadi menyebar luas dan menimbulkan konflik yang lebih besar. Pentingnya memberikan perhatian terhadap dinamika politik lokal tidak bisa dilepaskan dari konteks

desentralisasi di Indonesia yang menempatkan sumber daya kekuasaan begitu besar di ranah lokal (Anhaf, 2015).

Pada pemilihan kepala daerah Sumatera Utara tahun 2018, kepentingan politik bisa kita lihat ketika berbagai macam aksi yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok dalam kampanye. Salah satu isu yang diangkat dalam Pilkada ini adalah isu politik identitas yang merujuk pada Politisasi Agama. Di mana penggalangan isu yang digadangkan adalah “Isu bela Islam” dan melakukan berbagai gerakan-gerakan keagamaan yang dilakukan oleh relawan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 01. Akibatnya kepentingan yang bermain adalah menggunakan ulama yang bisa dijadikan tokoh politik untuk mendulang suara melalui isu-isu identitas (agama), seperti yang kita ketahui juga bahwa lawan politik dari pasangan nomor urut 01 (Eramas) adalah pasangan muslim dan nonmuslim, sehingga sangat mudah dalam menggiring opini publik terkait dengan politisasi agama, baik oleh tim pemenangan Eramas maupun relawan pemenangan yang terlibat. Dan isu identitas yang juga digalang adalah terkait isu putra daerah di mana Calon Gubernur nomor urut 02 Djarot Saiful Hidayat merupakan calon yang datang dari pulau Jawa dan juga merupakan calon wakil gubernur pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada tahun 2017, ditambah dengan isu penistaan bersama Basuki Tjahja Purnama yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu.

Politik identitas adalah hal yang tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dalam demokrasi, (Castells:2010). Pembentukan aliansi politik berdasarkan kesamaan identitas, nilai, atau latar belakang adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dalam demokrasi yang menjamin kebebasan. Bahkan bisa dibilang semua politik adalah politik identitas (Hall: 2005). Politik identitas merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik sedangkan political of identity mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumber dan sarana politik (Ambardi, 2011).

Politik identitas juga merupakan suatu bentuk dari pilihan politik yang berdasarkan perbedaan atau persamaan logika (Laclau Moufe: 2008). Lebih lanjut dijelaskan bahwa politik identitas lebih kepada sikap politik yang berfokus pada sub-kelompok dan merujuk pada aktivisme atau merujuk pada pencarian status yang dilandaskan pada kategori ras, gender, etnisitas, orientasi budaya, dan identifikasi politik lainnya (Ubed, 2002).

Sumatera Utara adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan suku, maka hal ini tak bisa memungkiri bahwa isu politik identitas (politisasi agama) masih menjadi primadona dalam menyambut pemilihan kepala daerah. Politisasi agama dalam aspek penyaluran aspirasi politik yang digunakan sebagai sarana kampanye untuk meraih kekuasaan, akan sangat berpotensi menjadi pemecah belah umat yang secara faktual tidak terkonsentrasi pada pasangan calon tertentu. Di mana kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur memiliki pendukung dari berbagai kalangan umat.

Politisasi agama juga dapat dikatakan sebagai politik manipulasi terkait pemahaman dan pengetahuan keagamaan dengan cara propaganda, indoktrinasi dan kampanye dalam wilayah publik agar terjadinya selisih paham antar umat beragama dan menjadikannya seolah-olah merupakan sebuah pengetahuan baru tentang keagamaan, yang kemudian dilakukan tekanan di dalamnya untuk mempengaruhi konsensus keagamaan dalam upaya memasukkan kepentingan politik di dalamnya.

Politisasi agama yang juga termasuk salah satu bagian dalam rekayasa politik ini juga merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan upaya untuk merancang dan menyusun strategi dalam hal ‘mencuci otak’ masyarakat. Hal ini berkaitan juga dalam Pilkada Sumatera Utara, dan bagaimana agar masyarakat turut serta berpartisipasi dalam memilih dan menjadi pemilih yang berdaulat. Yang menjadi catatan di sini adalah bahwasanya dalam rekayasa politik ini diperlukan metode dan kriteria yang sub-optimal, yang terkadang juga dapat mengakibatkan kegagalan hebat seperti dalam kasus upaya merekayasa medan politik suatu negara lewat metode misalnya kudeta. Kriteria dan hambatan-hambatan digunakan dalam rancangan seperti itu berbeda-beda, tergantung pada optimalisasi metode-metode yang dipergunakan. Semuanya juga merupakan suatu fungsi waktu dan tempat di mana rekayasa itu diberlakukan (Anhaf, 2015).

Pemanfaatan sentimen agama dalam kontestasi politik di antaranya tampak pada kegiatan kampanye yang menyerang kepercayaan lawan politik atau menyebarkan pidato terkait dengan kebencian atau ancaman yang berbau agama melalui isi ceramah para pemuka agama atau tokoh-tokoh lain yang berpengaruh dalam bidangnya. Politisasi agama ini juga berdampak pada eksklusifisme dan inklusifisme yang sudah selayaknya menjadi perhatian dari negara dan pihak-pihak terkait lainnya (Ahnaf, 2015).

Tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah untuk menganalisis proses politisasi agama yang dilakukan oleh pasangan calon Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah dalam kampanye pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Utara di kota Medan tahun 2018 serta dibidang lain juga dapat digunakan untuk menganalisis bentuk politisasi agama yang dilakukan pasangan calon Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah dalam kampanye pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara di kota Medan tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Di mana penelitian kualitatif didefinisikan sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati di sekitar. Dengan kata lain, metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen utama, (Sugiyono, 2010). Metode kualitatif merupakan penelitian yang diangkat dari realitas tertentu yang diinterpretasikan dengan tidak melewati prosedur statistika dan kuantifikasi lainnya, (Ritchie dan Lewis, 2004). Sehingga hasilnya dapat dideskripsikan dengan terperinci, aktual, dan sesuai dengan realita yang ada di lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Di mana, penelitian deskriptif biasanya mempunyai dua tujuan, untuk mengetahui perkembangan fisik tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu. Menurut (Sugiyono, 2013), mengenai jenis-jenis metode penelitian dapat diklarifikasikan berdasar tujuan dan tingkat kealamiah objek yang diteliti. Sedangkan menurut (Sukmadinata, 2009), penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang secara individual maupun kelompok.

Sedangkan menurut Sukmadinata, menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya (Sukmadinata, 2009). Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang bisa disebut dengan narasumber maupun sumber utama yang dilakukan dalam teknik pengumpulan data. Dan digunakannya metode penelitian jenis ini adalah agar penulis mampu menjabarkan secara aktual dan rinci terkait pola-pola, dan proses-proses politisasi agama yang terjadi pada masa kampanye tim pemenangan Eramas saat Pilkada Sumatera Utara tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pilkada Sumatera Utara tahun 2018 silam, tim pemenangan Eramas melakukan proses kampanye dengan cara yang tidak terlepas dari isu-isu keagamaan. Namun dalam hal ini, tidak ada pendeklarasian secara khusus dari pihak yang bersangkutan pada masa kampanye terkait adanya penggalangan isu agama tertentu, hanya saja tim pemenangan melakukannya dengan pendekatan yang lebih halus dan tidak mencolok akan hal-hal yang berbau agama tertentu. Agar pasangangan calon terlihat peduli dan tidak mengabaikan umat beragama. Dalam penggalangan isu agama tersebut tim pemenangan Eramas memunculkan tokoh-tokoh penting yang berkaitan dengan Agama (pemuka Agama) yang menjadi alat untuk meraih respon lebih terhadap minat pemilih bagi masyarakat.

Dalam proses penggalangan isu agama di sini, agama yang paling menonjol dalam proses kampanye adalah agama Islam, di mana tim pemenangan Eramas menaikkan isu politisasi agama yang sudah lebih dulu terjadi pada Pilkada DKI Jakarta. Di mana hal ini dilakukan oleh tim

pemenangan Eramas karena melihat peluang dari pasangan calon lawan yang memilih Djarot Saiful Hidayat sebagai calon gubernur Sumatera Utara yang sebelumnya juga adalah calon wakil gubernur pada pemilihan gubernur DKI Jakarta yang berpasangan dengan Basuki Tjahaya Purnama yang menjadi tahanan atas kasus penistaan agama, serta pasangan calon wakilnya Sihar Sitorus yang juga bukan beragama islam. Dan hal ini membuat kesan politisasi agama semakin kuat dalam proses kampanye ini, walau seperti yang disebutkan di atas, tidak ada deklarasi khusus dari pihak terkait perihal isu politisasi agama ini.

Politisasi agama di sini merupakan salah satu dari bentuk politik identitas yang “biasa” dilakukan para tim pemenangan dimasa kampanye. Dalam hal ini, yang merujuk pada politisasi agama yang dilakukan tim Eramas, yakni langkah awal yang dilakukan adalah dengan mendata para da'i, imam dan ustadz yang berada di Sumatera Utara melalui Yayasan Haji Anif, selanjutnya da'i dan imam mesjid ketika melakukan ceramah di mesjid-mesjid untuk menganjurkan memilih pemimpin yang sesuai akidah dan menjelaskan larangan untuk tidak memilih pemimpin kafir.

Tim pemenangan Eramas melakukan kegiatan yang bernuansakan agama islam dengan melakukan berbagai kunjungan seperti kegiatan tausiyah, perwiritan ibu-ibu, kunjungan ke pondok-pondok pesantren, hingga berziarah ke makam ulama-ulama besar Sumatera Utara serta tak lupa pula tim pemenangan membuat gerakan subuh berjamaah dan isu-isu keagamaan lainnya. Dan pada penggalangan isu yang bernuansakan agama islam ini tim pemenangan pasangan Eramas lebih banyak melakukannya dengan pasangan calon wakil gubernurnya, yaitu Musa Rajeckshah. Hal ini dikarenakan calon wakil gubernur Musa Rajeckshah mempunyai kesan yang santun dan dikenal memiliki banyak hubungan dekat dengan pemuka-pemuka agama. Salah satu contoh hubungan kedekatan Musa Rajeckshah dengan pemuka agama adalah dengan tokoh dai yang sedang naik daun yaitu Ustadz Abdussomad. Dan ini menjadi nilai tambah bagi pasangan Eramas dalam mencuri hati masyarakat dengan pendekatan politisasi agama. Kedekatan dengan pemuka agama islam ini tidak hanya dengan ustadz Abdussomad saja, namun Musa Rajeckshah juga memiliki hubungan yang baik dengan Ustadz Zulkarnain dan Ustadz Latif Khan, yang juga tengah digemari masyarakat Sumatera Utara dalam hal berdakwah.

Isu yang dibentuk tim pemenangan terhadap pasangan Eramas adalah pemimpin yang peduli akan umat, dan hal itu jelas terlihat jelas pada masa kampanye, di mana hampir tidak ada kegiatan yang bernuansa islam yang tidak di datangi oleh pasangan calon Eramas. Puncaknya penggalangan isu keagamaan yang dilakukan pasangan Eramas dan tim adalah dengan mengganti rapat umum terakhir menjadi kegiatan zikir akbar yang bertemakan “doa untuk Sumut bermartabat” yang dihadiri oleh ustadz-ustadz ternama yang memiliki hubungan kedekatan dengan Musa Rajeckshah di atas, dan mantan panglima TNI Gatot Nurmayanto. Dan dimana dalam kegiatan tersebut diberikan seruan dan anjuran kepada umat islam agar memilih dan memenangkan pemimpin yang seiman dan seruan untuk tidak memilih pemimpin kafir.

Di sisi lain, pasangan Eramas juga memiliki keuntungan karena mendapat nomor urut 01. Di mana hal ini menjadi simbol dengan mengacungkan jari telunjuk satu ke atas dan juga diketahui melambangkan simbol ketauhidan dan menambah satu logika bahwa Eramas memang menjadi pilihan umat dengan menarik makna asosiatif yang hadir pada simbol mengacungkan satu jari telunjuk ke atas.

Gerakan safari subuh berjamaah juga dilakukan rutin oleh pasangan calon Eramas setiap harinya dan dilakukan di masjid yang berbeda-beda. Gerakan subuh berjamaah ini juga dilakukan pada saat pasangan calon Eramas berada di luar daerah pada masa kampanye, hal ini dinilai efektif untuk dilakukan hingga hari pencoblosan tiba. Gunanya adalah untuk mengakomodir pemilih muslim setelah sholat subuh di mesjid untuk segera menuju lokasi TPS terdekat dan menggunakan hak pilihnya untuk memilih pemimpin yang seiman.

Kunjungan ke berbagai pesantren hingga berziarah ke makam ulama terdahulu juga merupakan bentuk perhatian pasangan calon Eramas terhadap pendidikan agama islam kepada generasi muda dan menghormati jasa para ulama yang telah tiada dalam membangun dan memperjuangkan bangsa sebelumnya. Dalam hal ini tim pemenangan Eramas ingin menampilkan citra populis sebagai calon pemimpin yang peduli dengan kegiatan sosial-keagamaan. Isu yang dibangun oleh tim terhadap pasangan calon dari nomor urut satu adalah pemimpin yang peduli akan umat, hal itu jelas dilakukan pada masa kampanye dan hampir tidak ada kegiatan yang bernuansa

islam yang tidak di datangi oleh calon wakil gubernur Sumatera Utara, baik itu yang perwiritan pengajian ibu, kunjungan ke pesantren di Sumatera Utara, dan kunjungan ke ziarah kubur di Barus dan Labuhan Batu Utara.

Puncak penggalangan isu untuk memilih pemimpin yang seiman dilakukan oleh tim pemenangan Eramas pada tanggal 23 juni 2018 ketika rapat umum terakhir yang di ganti mejadi Dzikir akbar dengan tema “*doa untuk sumut bermartabat*” yang di hadiri oleh Ustadz Abdussomad, Ustadz Zulkarnai, mantan panglima TNI Gatot Nurmantyo, dimana dalam aksi dan orasi tersebut seruan kepada kepada umat muslim untuk memenangkan pemimpin yang sesama akidah dan memilih pemimpin yang asli dari putra daerah Sumatera Utara.

Lebih lanjut lagi, menjelang hari pemilihan muncul baliho beberapa dan beberapa sudut jalanan di kota Medan dengan teks “larangan memilih pemimpin kafir”, secara tersurat bahwa memilih pemimpin muslim dan larangan memilih pemimpin non-muslim merupakan lanjutan dari pertangungan politik di DKI Jakarta tahun 2017. Narasi-narasi yang bernuansa keislaman terus dilakukan oleh tim pemenangan nomor urut 01 pada masa kampanye dan masa tenang hal ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa pasangan nomor urut 01 lebih mengedepankan kepentingan umat.

SIMPULAN

Proses politisasi agama yang dilakukan tim pemenangan pasangan Eramas pada masa kampanye adalah dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh agama, seperti mengundang dan menggelar acara zikir akbar bersama ustadz Abdussomad, Ustadz Tengku Zulkarnain, dan Ustadz Latif Khan, yang juga sudah memiliki hubungan kedekatan sejak awal dengan calon wakil gubernur, Musa Rajekshah. Pola-pola politisasi agama yang dilakukan oleh tim pemenangan Eramas adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keislaman, seperti safari dakwah, kegiatan memfasilitasi pembersihan mesjid-mesjid, melakukan kegiatan zikir akbar, mengunjungi perwiritan-perwiritan, hingga melakukan gerakan subuh berjamaah menjelang kegiatan Pemilihan dilakukan. Oleh karena itu, tampak jelas secara tidak langsung kegiatan kampanye melakukan pola dan proses politisasi agama dilakukan oleh tim pemenangan Eramas baik yang terlihat maupun yang dilakukan oleh relawan saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhol, A. (2021). Dilematis Perencanaan Karir Mahasiswa Akhir Pendidikan Agama Islam. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1122-1128. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.821>
- Ahnaf, M.I. (2015). Politik Lokal Dan Konflik Keagamaan Pilkada Dan Struktur Kesempatan Politik Dalam Konflik Keagamaan Di Sampang, Bekasi, Dan Kupang.
- Ambardi, K. (2011). How Smart Can We Go? The Quality of Campaign Information in the 2009 Presidential Election. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM*, Vol. 14. No. 3.
- Azhar, A.A. (2017). Pencitraan Politik Elektoral: Kajian Politik Segitiga PAN Dalam Merebut Simpati Masyarakat. Yogyakarta: Atap Buku
- Bagir, Z.A. (2011). Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman Indonesia. Bandung- Yogyakarta: Mizan dan CRCS
- Castells, M. (2010). *The Power of Identity*. Chichester: Wiley-Blackwell
- Castells, M. (2009). *Communication Power*. New York: Oxford University Press.
- Fukuyama, F. (2002). *Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qalam. Yogyakarta.
- Hall, S. (1992). “The Question of Cultural Identity” dalam *Modernity and Its Futures*. Hall, Stuart. Held, David. dan McGrew, Tony (ed). London: Polity Press.
- Hall, S. (2005). “Who Need “Identity”?” dalam *Identity: a Reader*. Gai, Paul Du. Evans, Jessica. dan Redman, Peter (ed). London: Sage Publications.
- Katzenstein, P. J. (1996). *The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics*. University Press.
- Kellner, D. (1995). *Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics Between The Modern and The Postmodern*. London: Routledge.
- Kristianus (2016). Politik dan Strategi Budaya Etnik dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat, Politik Indonesia: *Indonesian Political Science Review*, 1 (1): 87-101.
- Lukmantoro, T. (2008). *Kematian Politik Ruang*. Jakarta: Kompas

- Maarif, A.S. (2012). Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita. Jakarta: Democrazy Project edisi digital.
- Maleong, L.J. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda
- Manalu, S., Kadir, A., & Siregar, N. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Agama Tentang Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Dalam Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 168-177. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.57>
- Nainggolan, M. (2021). Eksistensi Penganut Agama Parmalim Dalam Negara Demokrasi Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 494-502. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.686>
- Nawawi, H. & Hadari, M. (2004). Kepemimpinan yang Efektif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Setyaningrum, A. (2005). "Memetakan Lokasi bagi 'Politik Identitas' dalam Wacana Politik Poskolonial". *Jurnal Mandatory Politik Perlawanan*. Edisi 2/ Tahun 2/ 2005
- Tanasaldy, T. (2007). "Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat" dalam *Politik Lokal di Indonesia* (ter.). Nordholt, Henk Schulte dan Klinken, Gerry Van (Ed). Jakarta: Obor.
- Ubed, A.S. (2002). Politik Identitas Etnis : Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Indonesiater.
- Von Beyme, K. (1996). Biopolitical ideologies and their impact on the new social movements. *Public Policy And Social Welfare*, 19, 113-132.
- Wikanda, F. (2018). Implikasi Pendidikan Agama Islam dan Responsi terhadap Keaktifan Salat Berjamaah Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (2): 117-121.